

PELUANG REPRESI SEBAGAI SOLUSI ANARKI*

Oleh Samsu Rizal Panggabean**

"Peace is anarchy"

(Herbert Read)

Sebuah majalah berita beberapa waktu lalu menjadikan "anarki" laporan utamanya. Laporan itu berjudul "Berbisnis di tengah rongrongan anarki. Bagaimana berkelit dari penjarahan, pembajakan, pemberontakan karyawan, pematokan, pendudukan, dan aksi-aksi beringas lainnya?"¹ Seperti laporan-laporan media lainnya, laporan ini menyoroti berbagai bentuk dan manifestasi anarki sosial yang terjadi pasca Orde Baru. Serupa berbagai laporan dan komentar lainnya, anarki selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan destruktif. Anarki ibarat penyakit yang akan menggerogoti jalinan sosial-politik, atau sebagai belenggu yang merintangangi proses demokratisasi di Indonesia.

Pandangan di atas tentu ada benarnya. Yang perlu ditambahkan adalah, pandangan tersebut dapat mengalihkan perhatian dari dinamika dan proses sosial yang lebih luas. Kontradiksi dan konflik yang ada pada struktur politik-ekonomi kontemporer, yang melatari anarki tersebut, tidak mendapat perhatian

* Tulisan ini dikembangkan dari makalah "Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki" yang disampaikan dalam *Seminar* "Anarki, Represi, dan Demokrasi" yang diadakan dalam rangka Dies Fisipol UGM 1998, 19 September 1998, dan dikemas khusus untuk tujuan penerbitan ini.

** Staf pengajar jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

¹ *Swasembada* 19 Agustus 1998.

yang semestinya. Yang juga diabaikan adalah bagaimana ketegangan dan frustrasi telah menumpuk cukup lama sementara struktur politik Orde Baru gagal menanggapi dan mengatasinya. Begitu pula, berbagai konsekuensi-sosial anarki lainnya terabaikan. Salah satu di antaranya adalah anarki dan konflik sosial sebagai lem perekat masyarakat, sabuk penyelamat, atau semen persatuan politik yang efektif.

Tulisan ingin mendiskusikan beberapa segi dinamika anarki dimaksud. Secara khusus, akan dikemukakan argumen bahwa masalah yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia bukanlah anarki, melainkan eksploitasi yang berlangsung di masa lalu, dan sekarang membuahkan hasilnya — terlepas dari apakah kita menyukainya atau tidak. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas pendekatan standar terhadap anarki sosial, yaitu represi dan penindasan. Akhirnya, tulisan ini akan menyinggung prinsip-prinsip penanganan masalah publik selain penggunaan represi.

Anarki

Kata anarki berasal dari bahasa Yunani kuno, *anarchia*, yang artinya “tanpa pemimpin.” Menurut Raymond Williams, pada awalnya, penggunaan kata ini tidak berbeda jauh dari penggunaan kata “demokrasi” yang dulu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai filsafat politik, anarkisme merujuk kepada sikap menolak pangeran, penguasa atau pemerintah. “Seorang anarkis,” kata Herbert Spencer pada 1862, “menolak hak pemerintah mencampuri kebebasan individu.” Dalam arti ini, makna anarki sebenarnya dekat dengan makna “demokrat,” “republican,” atau “liberal” yang cenderung menolak intervensi negara dan penguasa ke dalam urusan-urusan warganegara.²

Penggunaan kata anarki yang lain berasal dari periode Revolusi Perancis. Ketika itu, “kalangan anarkis” berarti kelompok-kelompok beraliran politik radikal yang menentang status-quo. Kemudian, di akhir abad ke-19, anarkisme menjadi suatu aliran dalam gerakan sosialis dan buruh yang menentang bentuk-bentuk Marksisme yang ingin menguasai atau mendirikan negara dan

² Raymond Williams, *Keywords* (New York: Oxford University Press, 1983) hal 37

menentang “sosialisme negara” dan “kediktatoran proletariat.” Salah satu bentuk gerakan buruh yang dikenal dengan nama anarko-sindikalis ingin membentuk serikat-serikat buruh yang mandiri dan menentang campur tangan negara. Variasi makna lainnya bersumber dari kelompok kecil kaum anarkis yang menghalalkan kekerasan, pembunuhan politik, dan terorisme, khususnya yang ditujukan kepada penguasa. Di luar berbagai pengertian ini, Williams juga mengatakan bahwa pengertian anarki sebagai setiap situasi ketidaktertiban dan kekacauan sudah dikenal sejak lama.³

Anarki sebagai situasi ketidaktertiban dan kekacauan diyakini meluas dalam masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru. Jika disimpulkan dari komentar dan observasi kalangan media, para mengamat, dan pejabat pemerintah, anarki dapat diartikan sebagai situasi yang ditandai dengan ketiadaan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selaras dengan ini, anarki juga berarti tidak tegaknya hukum. Bentuk-bentuk anarki tersebut, seperti tampak pada subjudul laporan yang disebutkan di atas, adalah “penjarahan, pembajakan, pemberontakan karyawan, pematokan, pendudukan, dan aksi-aksi beringas lainnya.”

Situasi ketidaktertiban dan kekacauan tentu saja tidak disukai negara mana pun. Ini selaras dengan pandangan tradisi liberal dalam pemikiran politik yang mengatakan bahwa hidup di bawah pemerintahan tertentu lebih baik dibanding hidup tanpa pemerintahan, dalam situasi *state of nature*. Walaupun pemerintahan itu dipandang sebagai sesuatu yang buruk (*evil*), kondisi manusia dianggap akan menjadi lebih buruk lagi jika mereka hidup tanpa pemerintahan. Untuk memelihara ketertiban dan keamanan, negara menggunakan koersi dan kekerasan. Dalam definisi Max Weber, negara adalah lembaga yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah. Monopoli ini diperlukan supaya anarki dan kekerasan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar perbatasan negara, dapat diatasi.⁴ Militer dan polisi adalah wakil formal negara yang, dengan struktur organisasi yang rapih, bertugas membela dan mempertahankan keamanan dan ketertiban.

³ *Ibid.* Lihat juga Kenneth Burke, *A Grammar of Motives* (New York: Prentice-Hall Inc., 1952) hal. 345 ff.

⁴ Scott Turner, “Global Civil Society, Anarchy and Governance: Assessing an Emerging Paradigm,” *Journal of Peace Research* 35(1)1998, hal 37.

Kendati demikian, negara yang memonopoli penggunaan kekerasan bersenjata ternyata sering menjadi sumber *evil* dan bencana. Dalam kasus Indonesia, organ utama kekerasan, yaitu angkatan bersenjata, menjalar dan menyusup ke berbagai kawasan kehidupan. Pada masa Orde Baru, batasan teritorial dan fungsional terhadap militer hampir-hampir tidak ada. Negara seolah-olah hendak dijadikan kompleks birokrasi militer yang pada gilirannya menimbulkan suasana otoriter dan darurat. Lebih dari itu, negara melakukan berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, penculikan dan penembakan warganegara, dan pemenjaraan orang karena pendirian politik atau keyakinan agamanya. Anggapan bahwa hidup di dalam negara lebih aman daripada hidup dalam suasana anarki bagi banyak orang semakin sulit dibenarkan. Stabilitas politik yang didendangkan pemerintah terdengar seperti lelucon jika diingat kasus Aceh, Timtim, Irian, Tanjung Priok, Lampung, dan seterusnya. Rejim politik otoriter dan totaliter serupa rejim Orde Baru menjadi kondisi utama di balik kekerasan negara dan besarnya pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Anarki sosial yang terjadi akhir-akhir ini dapat ditempatkan pada latar kekuasaan rejim Orde Baru yang sarat kontradiksi dan konflik seperti disebutkan di atas. Selama Orde Baru, pembangkangan dan perlawanan yang radikal memang sulit berkembang, meluas, dan bervariasi. Kalau timbul, langsung ditindas tanpa ampun. Ini berlaku untuk gerakan buruh, tuntutan otonomi, partisipasi dan redistribusi di berbagai daerah, dan perlawanan petani. Sistem kekuasaan yang eksploitatif berhasil mengatur atau menentukan harapan dan respon yang mungkin mereka ambil jika ingin selamat.

Bersamaan dengan itu, warganegara menjadi pihak yang disalahkan atau dikambinghitamkan. Ketika menuntut partisipasi politik, warganegara disalahkan dengan tuduhan mengganggu stabilitas. Ketika menuntut keadilan mereka dituding mengamuk atau terpancing emosi yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan. Kepada mereka dikatakan berulang-ulang bahwa pemerintah selalu berada di pihak yang benar dan *crises of governance* yang disuarakan mahasiswa dan cendekiawan hanyalah kritik murahan dari pihak-

⁵ Neil J. Mitchell, & James M. McCormic, "Economic and Political Explanations of Human Rights Violations," *World Politics* XL(4) Juli 1988, hal. 480.

pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam situasi semacam ini, respon yang paling masuk akal adalah apatisme, ketidakberdayaan, gerakan cari-selamat, dan aneka patologi sosial lainnya.⁶

Keadaan berubah drastis setelah sistem kekuasaan yang eksploitatif tersebut rubuh. Seperti berlaku di berbagai sistem politik lainnya dalam sejarah, melemahnya kontrol pusat berjalan seiring dengan peningkatan pembangkangan dan kekacauan sosial.⁷ Anarki, dalam hal ini, adalah pertanda jatuhnya rejim lama dan dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengandung unsur positif dan konstruktif apabila rejim lama itu brengsek dan korup. Bentuk-bentuk tindakan anarkis yang diambil, seperti penjarahan, menjadi indikator ketidakmampuan aparat keamanan menerapkan koersi sebagai alat menciptakan keamanan dan ketertiban. Anarki juga mengisyaratkan hilangnya legitimasi aparat keamanan yang di masa lalu menjadi alat kekuasaan rejim. Ancaman tembak di tempat pun dianggap sepi. Malahan penerapan perintah tembak di tempat dapat memukul balik, menjadi bumerang, seperti tampak dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Kalau birokrasi militer memihak dan membela kekuasaan yang eksploitatif, maka lembaga ini akan dijadikan sasaran protes sosial.⁸

Luasnya cakupan protes dan pembangkangan terhadap sistem kekuasaan eksploitatif yang sedang bangkrut juga tampak nyata dari luasnya partisipasi dalam berbagai penjarahan dan kerusuhan dan pematokan. Yang beraksi bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak; bukan hanya laki-laki, tetapi juga

⁶ Kasus Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang dicanangkan tahun 1997 adalah contoh menarik yang menunjukkan bagaimana meluasnya apatisme di masyarakat. Apati masyarakat yang sedang tidak berdaya menghadapi sistem yang eksploitatif dan krisis ekonomi yang sedang berlangsung dipandang pemerintah sebagai persoalan ketidaksiplinan nasional. Karenanya, persoalan itu diselesaikan dengan gerakan disiplin nasional. Tidak ada usaha mengakui letak persoalan yang sesungguhnya, yaitu konflik dan kontradiksi yang ada pada struktur politik dan sosial Orde Baru. Begitu pula, tidak ada kehendak mengakui bahwa apatisme itu adalah kritik terhadap rejim.

⁷ Bob Jessop, *Social Order, Reform and Revolution* (London: Macmillan, 1972), hal. 86.

⁸ Di alam reformasi, ABRI sering mengeluh dan keberatan karena sering "dihujat." Keluhan dan keberatan ini sama sekali tidak sportif dan konstruktif karena mengabaikan keikutsertaan ABRI, hingga menit-menit terakhir, dalam membantu menopang kekuasaan yang eksploitatif era Orde Baru. Yang berpartisipasi dalam eksploitasi tidak punya hak tampil "tak berdosa" atau *innocent*. Yang sportif dan konstruktif bagi masa depan citra ABRI adalah pengakuan dosa dan permohonan ampunan, misalnya dengan menghentikan campurtangan politik dan selanjutnya tuntut kepada pimpinan yang dipilih secara demokratis.

perempuan. Dalam sejarah protes, partisipasi yang majemuk ini berlangsung bukan karena “moral bangsa kita sudah hancur berkeping-keping.”⁹ Ini adalah pertanda betapa besar dan luasnya tantangan dan kritik terhadap kondisi yang ada. Aparat biasanya menjadikan keikutsertaan pengganggu dan preman dalam aksi penjarahan sebagai sorotan utama. Tetapi, yang harus dicatat baik-baik adalah keikutsertaan perempuan dalam aksi-aksi kerusuhan dan penjarahan. Keikutsertaan mereka adalah bukti gawatnya kondisi yang diprotes dan ditentang rakyat, dan kuatnya desakan supaya perubahan berlangsung.¹⁰

Sasaran atau obyek tindakan anarki perlu pula mendapat perhatian karena mengandung hikmah tersendiri. Yang dijarah bukanlah gudang amunisi atau markas besar angkatan bersenjata. Perusuh, penjarah, karyawan pemberontak, atau pematok tidak menganggap amunisi atau tanda bintang sebagai bagian dari kebutuhan pokok mereka. Yang dijarah adalah lokasi kebutuhan pokok dan apa saja yang dinilai menjadi pokok sengketa, seperti toserba, kebun bawang, gudang beras, truk pengangkut gula pasir, kebun kakao, kebun kopi, dan tambak udang ekspor. Yang dipatok adalah *ranch* dan lapangan golf yang diperoleh lewat jalur curas dan penipuan blak-blakan. Yang dimogokkan adalah angkutan kota yang kesulitan onderdil atau perusahaan yang memeras pekerjaannya. Semua ini menunjukkan bagaimana pilihan sasaran dan isu protes tidak muncul secara kebetulan. Pilihan itu mengisyaratkan prinsip yang dikemukakan, kebutuhan yang diprihatinkan, dan pengalaman tertindas secara kolektif.¹¹

Represi

Tepatan represi secara militer digunakan sebagai alat mengatasi anarki sosial seperti diterakan di atas? Bagi sebagian kalangan, jawabnya positif. Pendapat dominan di kalangan aparat keamanan, kalangan bisnis, dan pemerintah pada umumnya mengatakan bahwa yang paling bertanggungjawab mengatasi anarki

⁹ “Ketika Hukum Tak Lagi Diindahkan,” *Swasembada*, *op. cit.*, hal. 24.

¹⁰ Anne Norton, *Reflections on Political Identity* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988), hal. 171

¹¹ Richard Cloward and Frances Fox Piven, *Poor People's Movements* (New York: Vintage, 1979), hal. 20-21

adalah ABRI. Asumsinya cukup jelas. Oleh karena angkatan bersenjata merupakan pemegang monopoli penggunaan kekerasan bersenjata, dan oleh karena anarki adalah persoalan pemulihan keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum, maka ABRI ialah pihak yang paling dapat diandalkan mengubah anarki menjadi tertib sosial. Selaras dengan ini, ABRI mengerahkan SSK (satuan setingkat kompi) untuk mengatasi kerusuhan dan berbagai bentuk kekerasan kolektif. Semakin besar skala kerusuhannya, semakin besar pula daya represi yang digunakan.

Akan tetapi, anggapan di atas memiliki kelemahan mendasar. Jangankan dalam situasi gawat dan disequilibrium total seperti yang dihadapi Indonesia sepanjang tahun 1998. Dalam kehidupan politik yang normal pun pendekatan represi mengandung banyak kelemahan. Pendekatan represi mengandung pemikiran tersendiri mengenai definisi tugas dan tindakan yang akan diambil. Biasanya, fokus pendekatan ini adalah memulihkan keamanan dan ketertiban, menangkapi para pelaku, dan kemudian mengadili para pelaku yang dianggap “bertanggungjawab.” Dalam konteks inilah dapat dipahami aparat yang mengatakan kepada publik bahwa “situasi aman terkendali” setiap kali mereka menggunakan represi. Padahal, yang terjadi barulah penangkapan warganegara yang diduga sebagai pelaku yang bertanggungjawab.

Lebih lanjut, pendefinisian tugas seperti di atas mengandung konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Oleh karena aparat keamanan menilai situasi yang ada sudah parah, mereka memberikan respon yang agresif dan represif dengan harapan keamanan dan ketertiban akan pulih. Sikap dan motif yang menyertai pendekatan ini ditandai dengan agresi, dominasi, atau rasa malu karena stabilitas yang harus dipertahankan *at all cost* ternyata telah diinjak-injak para pelaku yang dianggap sebagai perusuh dan pengacau. Dalam situasi seperti ini, warganegara berubah menjadi musuh yang harus dihancurkan. Akan tetapi, yang terjadi bukan pulihnya keamanan dan ketertiban, tetapi meningkatnya polarisasi dalam masyarakat yang pada gilirannya menuntut respon yang lebih represif lagi.

Pada saat yang sama, akar persoalan luput dari perhatian dan penanganan. Penggunaan represi sangat menekankan manajemen, kontrol, dan pengurangan kemungkinan timbulnya tindakan-tindakan yang dipandang anarkis. Yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana memenuhi kebutuhan, aspirasi, atau keinginan masyarakat supaya persoalan tidak timbul sejak

yang punya nalar dan mampu bertindak berdasarkan prinsip tertentu.¹² Amat disayangkan apabila pendekatan ini berlanjut ke era pasca-Soeharto.

Implikasi pendekatan represif lainnya menyangkut lokasi politik dalam sistem politik Orde Baru. Ada anggapan bahwa politik hanya ada di lembaga-lembaga formal seperti partai politik, DPR, MPR dan lain-lain pada tingkat nasional. Para pemain politik di arena-arena ini adalah elit. Di luar itu, di desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota, atau di pabrik dan di kampung, tidak ada politik. Yang ada paling-paling isu yang tidak benar, oknum yang tidak bertanggungjawab, kabar burung yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ketidaksenangan segelintir orang terhadap pemegang otoritas, atau penjarah dan kriminal. Ini turut menjelaskan mengapa kerusuhan sembako, dan kerusuhan atau penjarahan yang frekuensinya meningkat tajam dua tahun belakangan, tidak diperlakukan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat banyak dalam sistem politik yang menindas dan gagal memenuhi kebutuhan warganya. Yang terjadi justru sebaliknya. Kerusuhan sembako tidak lebih dari gangguan keamanan dan ketertiban yang – meminjam istilah seorang jenderal, harus dilibas.

Sangat sedikit tanda yang menunjukkan pemerintah bersedia mengaku salah dan menerima fakta bahwa protes dan kerusuhan adalah kritik terhadap pemerintah dan pemegang otoritas pada umumnya, baik langsung maupun tidak. Publik melancarkan kritik tersebut dengan mengambil-alih dan melakukan tindakan-tindakan yang dinilai masyarakat (dan diakui pemerintah) sebagai tanggungjawab pemerintah dan pemegang otoritas, tetapi terbukti gagal ditunaikan. Demonstrasi mahasiswa, pemogokan supir angkutan kota, dan penjarahan yang dilakukan penduduk miskin tidak pernah dipandang sebagai kritik terhadap kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dengan kata lain, penggunaan pendekatan represi mengalihkan perhatian pemerintah dari pertanggungjawaban dan tindakan mengambil langkah penyelesaian masalah yang serius.

¹² Lihat Charles Tilly, "Food Supply and Public Order in Modern Europe," Charles Tilly, ed., *The Formation of National States in Western Europe* (Princeton: Princeton University Press, 1975).

Mencari Alternatif

Apabila represi tidak selalu dapat diandalkan, usaha-usaha mencari alternatif pendekatan tentu merupakan agenda penting politik di Indonesia. Sebagai langkah awal untuk ini, diperlukan perubahan cara pandang terhadap konflik dan kekerasan kolektif.

Pertama-tama, dalam kerusuhan dan anarki sosial, yang tersedia bukan hanya risiko dan mara bahaya, tetapi peluang juga. Dalam uraian di atas telah ditekankan anarki sosial sebagai risiko paling besar yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa risiko tersebut seimbang dengan peluang yang tersedia. Seperti kata orang, di mana ada bahaya, di situ ada keselamatan. Dalam kerusuhan sembako, misalnya, ada risiko rusaknya fasilitas publik dan terganggunya aktivitas ekonomi di suatu kota yang dilanda kerusuhan. Akan tetapi, pada saat yang sama, dalam kerusuhan sembako ada peluang. Misalnya adalah peluang menyadari ketidakberesan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sembako. Apabila pemerintah responsif dan sadar, pemerintah dapat mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan supaya masalah sembako terbereskan.

Kedua, kerusuhan dan tindakan-tindakan anarki jangan hanya dipandang sebagai persoalan keamanan dan penegakan hukum. Anarki dilatarbelakangi atau difasilitasi oleh kondisi sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan premanisme. Tetapi, ini saja tidak cukup. Anarki juga difasilitasi oleh rejim yang mendominasi konglomerat dan fakir miskin. Selain itu, supaya anarki berlangsung, yang diperlukan bukan hanya meluasnya pelanggaran hukum, tetapi juga janji-janji palsu Bapak Pembangunan, kegagalan swasembada pangan, serta pemenuhan kebutuhan pokok lain yang menjadi sasaran protes. Prilaku-prilaku anarkis bersumber dari, atau ditentukan oleh, kondisi yang sekarang sedang meliputi masyarakat luas. Kondisi tersebut ditandai dengan kegagalan dan distorsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganegara di bidang keamanan, pangan, pemerintahan, dan martabat sosial mereka. Anarki dapat dihentikan dengan pendekatan yang menekankan pemenuhan kebutuhan asasi manusia seserius dan sesegera mungkin tanpa embel-embel represi.

Dengan memandang persoalan anarki melulu dalam terma-terma keamanan dan penegakan hukum, maka penyelesaian masalah mendasar, seperti pengangguran, krisis ekonomi, krisis legitimasi, dan kegagalan berbagai

kebijakan pemerintah. Sehubungan dengan masalah sembako, misalnya, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat, bukan menindak perusuh. Yang perlu dilaksanakan sesegera mungkin adalah melayani masyarakat, bukan menegakkan hukum dan memelihara ketertiban. Yang mendesak dilakukan adalah mengawasi pasar dan mengidentifikasi wilayah yang paling rentan terhadap kemiskinan dan kelangkaan pasokan bahan pokok, bukan mencari-cari kambing hitam. Sebaliknya, tujuan memenuhi kebutuhan rakyat yang paling sah dan asasi tidak dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Selaras dengan ini, alat-alat koersi dan represi seperti militer bukanlah pihak yang berkompeten mencapai tujuan tersebut. Malahan, penggunaan represi tampak seperti pelecehan terhadap persoalan yang dihadapi.

Selanjutnya, pendekatan yang menekankan pemulihan keamanan dan penegakan hukum bukanlah pendekatan yang tepat untuk skala dan *magnitude* krisis dan anarki yang dihadapi saat ini. Dalam situasi krisis yang multidimensi, pendekatan pemulihan keamanan dan penegakan hukum seringkali tidak mengenai sasaran karena pendekatan ini mengasumsikan situasi normal. Dalam situasi normal itu, perimbangan kekuatan pemaksa memang cenderung kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Apabila situasi normal tidak ada seperti halnya situasi di Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru di tengah-tengah krisis ekonomi dan moneter, maka perimbangan kekuatan pemaksa bergeser. Aparat, misalnya, tidak akan dapat bertindak dengan efektif menghadapi kerusuhan apabila kerusuhan itu sudah meluas meliputi seluruh kota. Dalam situasi seperti ini, negara tidak memiliki cukup penjara dan tahanan polisi untuk menampung beribu-ribu peserta kerusuhan dan protes sosial yang ditangkapi aparat keamanan.

Banyak bentuk anarki yang mencemaskan sebenarnya adalah bagian dari fungsi dan mekanisme yang lebih luas dalam tubuh politik kita. Pesan yang disampaikan anarki adalah perlunya menyelesaikan masalah bersama di saat kritis sekarang ini. Anarki seharusnya mendorong pemerintah dan masyarakat luas supaya lebih memperhatikan kepastian pasokan bahan-bahan pokok dengan harga yang masuk akal dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia lainnya. Anarki seharusnya mengingatkan semua pihak mengenai perlunya memulihkan kehidupan bersama yang berlandaskan kerjasama, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, yang jauh dari praktik-praktik kekuasaan yang eksploitatif. Dengan cara inilah anarki menjadi kritik dan protes terhadap negara dan pemegang otoritas.

Daftar Pustaka

- Burke, Kenneth, *A Grammar of Motives*, New York: Prentice-Hall Inc., 1952.
- Charles Tilly, ed., *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton: Princeton University Press, 1975.
- Cloward, Richard, and Frances Fox Piven, *Poor People's Movements*, New York: Vintage, 1979.
- Jessop, Bob, *Social Order, Reform and Revolution*, London: Macmillan, 1972
- Norton, Anne, *Reflections on Political Identity*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.
- Williams, Raymond , *Keywords*, New York: Oxford University Press, 1983.
- Journal of Peace Research*, Vol. 35, No. 1998.
- World Politics*, XL(4), July, 1988.
- Swasembada*, 6-19 Agustus, 1998.